

EDUCATIONAL FINANCING MANAGEMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AT JABAL NUR KANDIS ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Agnes Ika Ningrum¹, Irawati^{2*}, Rini Setyaningsih³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Koresponden: irawati@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This research aimed at 1) Knowing the implementation of educational funding management through entrepreneurship development, 2) Know the contribution results of entrepreneurship development at Islamic Boarding School of Jabal Nur Kandis, Riau. This research used qualitative method. The main informant of this research was school treasurer, and additional informants were the head of Islamic boarding school and person in charge of business unit. The object of this research was Islamic Boarding School of Jabal Nur Kandis, Riau. The findings of this research showed that one of the 1) Planning in funding at Islamic boarding schools was creating business units to assist Islamic boarding school operations. The implementation of education funding at Islamic boarding schools was in accordance with the needs every unit based on the principle of education finance. The implementation of education funding in the form of recording incoming money from tuition fees, annual fees and from Islamic boarding school business units and outgoing money based on the budget for activities that have been planned. Educational Supervision was conducted directly by the leadership and treasurer of the Islamic boarding school. 2) The results and contributions in developing entrepreneurship were focused on existing business units and a portion of the sales profit that would be allocated to assist Islamic boarding school operations.

Keywords: Management, Financing, Education, Development, Entrepreneurship

ABSTRACT

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan, 2) mengetahui hasil kontribusi pengembangan kewirausahaan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu bendahara pondok, informan pendukung yaitu pimpinan pondok pesantren, dan penanggung jawab unit usaha. Objek dalam penelitian ini yaitu Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan dalam pembiayaan di pondok pesantren salah satunya yaitu membuat unit-unit usaha untuk membantu operasional pesantren. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di pesantren sesuai dengan kebutuhan setiap unit yang ada di pesantren berdasarkan prinsip pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berupa pembukuan uang masuk baik dari uang SPP, uang tahunan maupun dari unit-unit usaha pesantren dan uang keluar yang berdasarkan anggaran kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Pengawasan pendidikan dilakukan langsung oleh pimpinan dan bendahara pondok pesantren. 2) Hasil dan Kontribusi dalam pengembangan Kewirausahaan ini difokuskan pada unit usaha yang ada dan profit penjualan sebagian akan dialokasikan untk membantu operasional pesantren.

Kata kunci: Manajemen, Pembiayaan, Pendidikan, Pengembangan, Kewirausahaan

INTRODUCTION

Pendidikan adalah tiang yang kokoh bagi kemajuan masyarakat dan negara. Dunia berubah melalui pendidikan, maka pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara terstruktur dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Tahapan seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan harus dilakukan dengan cermat. Peran pengelola pendidikan sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan yang diberikan (Winario & Irawati, 2018).

Pendidikan adalah hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, atau status ekonomi. Hak ini tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang kaya. Pendidikan adalah hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, dari berbagai lapisan masyarakat. (Irawati, 2020).

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidik, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana (Undang-Undang Nomor 20, 2023).

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003, Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan yaitu, pengelolaan dana pendidikan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang Nomor 20, 2023).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan melibatkan banyak aspek, di antaranya adalah pengelolaan sumber daya keuangan. Sekolah harus mampu mengelola data dengan jelas, termasuk perencanaan, implementasi, evaluasi, dan akuntabilitasnya. Pembiayaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam menjalankan pendidikan. (Lisnawati, 2019).

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik (Rida Fironika, 2011).

Menurut Fattah, (2000), biaya pendidikan yang lebih rendah dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan di Sekolah Dasar, termasuk proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara besaran biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan diterimanya pendapatan keuangan yang diperoleh sekolah dari dana APBN, APBD dan masyarakat atau orang tua serta digunakannya dalam membiayai setiap program pendidikan yang dirancang (Khambali et al., 2021).

Sebagai institusi pendidikan, pondok pesantren memiliki karakteristik dan keunikan yang membedakannya dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pesantren tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan transformasi masyarakat secara efektif. Selain itu, pesantren juga dianggap sebagai sub-kultur karena memiliki identitas dan

karakteristik yang berbeda dalam hal nilai, budaya, kurikulum, kepemimpinan, dan manajemen dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini menjadikan kemampuan pesantren dalam mengalami perubahan dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan kiai dalam struktur pesantren tersebut.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pondok pesantren terutama dalam masalah pembiayaan pendidikan yaitu keterlambatan orang tua dalam pembayaran uang bulanan. Hal tersebut dapat menghambat dalam proses pengalokasian pembiayaan pesantren. Maka pada saat ini banyak pondok pesantren yang berinovasi dalam pengembangan kewirausahaannya untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Hal ini dapat menjadikan pondok pesantren yang mandiri.

Berdasarkan observasi awal di Pondok Pesantren Jabal Nur ditemukan beberapa gejala yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan, adapun gejala-gejalanya adanya keterbatasan sumber pendanaan Pondok Pesantren, besarnya biaya operasional Pondok Pesantren, dan dijalankannya sistem kewirausahaan. Permasalahan yang dalam penelitian ini yakni mengenai Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis, dan bagaimana Kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis melalui pengembangan kewirausahaan.

LITERATUR REVIEW

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen Pembiayaan adalah proses pengelolaan sumber dana yang ada dengan cara mengalokasikan dan mendistribusikannya sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, fokus manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mengelola sumber dana secara profesional agar memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. (Syukur, 2011)

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan bertanggung jawab secara transparan dalam pengelolaan dana kepada masyarakat dan pemerintah. Sekolah memiliki kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini dikarenakan dunia pendidikan umumnya mengalami keterbatasan dalam hal dana atau biaya. (Lisnawati, 2019).

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Sejauh ini tercatat dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa dan yayasan (Supriyadi, 2020).

Standar pembiayaan adalah kegiatan yang mengatur semua komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62, standar pembiayaan melibatkan beberapa aspek:

1. Pembiayaan Pendidikan: Terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

2. Biaya Investasi: Meliputi biaya untuk sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya Personal: Merujuk pada biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya Operasi: Termasuk honorarium pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian dan penggunaan alat, bahan, atau peralatan pendidikan yang habis pakai, serta pembiayaan operasional pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
5. Standar Biaya Operasi: Ditentukan melalui Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen sekolah yang mengatur jalannya pembiayaan dan mengatur jalannya kegiatan pendidikan di madrasah. Kegiatan yang dilakukan oleh manajemen keuangan adalah melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian karena pendidikan dalam menjalankan operasionalnya tidak lepas akan adanya biaya (Fattah, 2000).

Pengembangan Kewirausahaan

Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis "entreprendre" yang berarti mengusahakan. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "entrepreneur" yang artinya pengusaha atau wiraswasta. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai hasil tertentu melalui tahap pengenalan peluang usaha, pengelolaan risiko, dan kemampuan komunikasi untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan suatu proyek dengan baik (Kurniawan Prambudi Utomo, Faroman Syarief, 2021).

Kewirausahaan dapat dianggap sebagai keberanian seseorang untuk melakukan berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan hidup, dengan menggunakan kemampuan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Dinar et al., 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan (Sonedi et al., 2017), yang meneliti tentang manajemen pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, ditemukan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya dilakukan langsung oleh kepala madrasah. Pengawasan penggunaan dana tersebut dalam bentuk rekapitulasi realisasi secara global, meskipun laporan oleh bendahara didasarkan pada catatan pengeluaran yang menjadi bahan laporan. Namun, dalam hal bukti catatan pengeluaran dana tidak terduga, belum terdokumentasikan dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan Adzka, (2022), yang meneliti tentang analisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Islam Terpadu Rahmatan Lil Alamin Bogor, disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SMP IT Rahmatan Lil Alamin meliputi tiga tahap utama. Pertama, perencanaan, di mana kegiatan sekolah disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh sekolah bersama dengan yayasan setiap tahunnya pada awal tahun ajaran. Kedua, pelaksanaan, di mana pembiayaan dilakukan melalui berbagai sumber seperti infaq siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), unit usaha sekolah, uang kegiatan, dan sumbangan masyarakat. Ketiga, evaluasi, dilakukan oleh SMP IT Rahmatan Lil Alamin dua kali setiap tahunnya, yaitu di pertengahan dan di akhir tahun ajaran, dengan mengadakan rapat kepada pihak yang terkait. Proses manajemen pembiayaan pendidikan di

SMP IT Rahmatan Lil Alamin memiliki dampak positif pada peningkatan mutu lulusan, terlihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan pengembangan karakter siswa dan penerapan budaya religius di sekolah.

METHOD

Jenis penulisan yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak Riau.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak, dari segi tempat, waktu, dan biaya untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak. Subjek dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yaitu pimpinan pondok pesantren, bendahara pondok pesantren, kepala-kepala kewirausahaan. Inti dari penelitian saat ini adalah bahwa orang-orang tersebut adalah unsur pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu manajemen pembiayaan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis.

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, Data sekunder Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi Triangulasi Data, Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan memberikan analisis data-data tentang manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan, data tersebut akan disajikan dengan penyajian data penelitian di atas.

Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Riau

Berdasarkan penyajian data di atas bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur merupakan tahapan pertama yang digunakan oleh pondok pesantren sebagai bahan persiapan apa saja yang akan dilaksanakan dan tentang apa yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Maka dari itu pondok pesantren berinisiatif untuk mendirikan unit-unit usaha menjadi bagian dari perencanaan pembiayaan pendidikan yang tujuannya untuk pemenuhan pendanaan pondok pesantren.

Manajemen pembiayaan pendidikan harus dimulai dengan tahap perencanaan sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Pondok pesantren juga memperhatikan sumber pembiayaan pendidikan yang dihasilkan mulai dari uang SPP, dan uang tahunan pondok pesantren, serta sebagian dari hasil unit-unit usaha yang dimiliki. Unit-unit usaha ini nantinya sebagai penyokong sumber sumber keuangan serta menjadikan lembaga yang mandiri, karena nantinya pesantren akan terus menerus melakukan cara untuk memenuhi kebutuhannya tanpa tergantung pada pihak lain dan akan menciptakan ciri khas tersendiri bagi lembaga. Pada tahap perencanaan seluruh yayasan rapat

untuk merencanakan anggaran kegiatan pesantren dan unit usaha sebagai sumber pembiayaan pendidikan tambahannya. Dalam kegiatan perencanaan dan koordinasi dari berbagai sumber kegiatan untuk mencapai kegiatan dalam periode tertentu melalui analisis perkiraan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai (Arifudin et al., 2021).

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan di pondok pesantren meliputi kegiatan pembukuan uang masuk dan uang keluar yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan pondok pesantren. Dalam pelaksanaan pembiayaan pondok pesantren bendahara menggerakkan staff tata usaha dalam pembukuan uang keluar dan uang masuk biaya pendidikan yang berdasarkan SOP pesantren. Pelaksanaan pembiayaan ini berada dalam naungan yayasan. Pada dana pemasukan yang berasal dari uang SPP di fungsikan untuk biaya makan, laundry dan listrik, galon dan gaji guru. Sumber pemasukan uang tahunan difungsikan sebagai biaya operasional kegiatan tahunan, pembangunan, fasilitas sarana santri serta perawatan fasilitas yang sudah ada. Biaya pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di alokasikan untuk santri yang kurang mampu dan berprestasi, kesejahteraan guru, anak yatim serta sumbangan untuk masjid. Bendahara berperan penting dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan yang ada di pondok pesantren agar pembiayaan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan ini memiliki faktor penunjang yaitu support dari yayasan, orang tua wali santri, serta staff ustadz dan ustadzah pondok pesantren, dukungan mereka dalam mendirikan unit usaha agar pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan ini tetap berlanjut dan unit usaha makin berkembang.

Anggaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren pada rapat tahunan, namun dalam pencairan dana harus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi pembengkakan pada anggaran pendidikan, baik pencairan yang akan digunakan untuk pengembangan unit usaha. Pengawasan pembiayaan di pondok pesantren secara langsung dilakukan oleh bendahara pondok pesantren dalam memeriksa kesesuaian data pengajuan maupun pencairan anggaran untuk menentukan anggaran yang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Pengeluaran anggaran pembiayaan pendidikan maupun anggaran untuk unit usaha sendiri harus berdasarkan dengan persetujuan pimpinan pondok pesantren, setelah pimpinan menyetujui anggaran tersebut bendahara pondok akan mengeluarkan anggarannya.

Dalam melakukan upaya pengawasan pesantren mengelola pembiayaan dengan efisien dan transparan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pesantren dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Pada manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan ini berada dalam naungan yayasan.

Pada hakikatnya pengawasan merupakan aktivitas melihat, memperhatikan, memonitoring, memeriksa, menilai dan melap orkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Tumanggor et al., 2021).

Dalam pengawasan pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Jabal Nur juga melakukan evaluasi. Evaluasi diadakan setiap minggu dan setiap bulannya yayasan mengadakan evaluasi pembiayaan pendidikan dan evaluasi mengenai ekonomi pesantren. Evaluasi ini dilakukan agar mengetahui kesalahan serta melihat pendapatan biaya dari unit usaha yang ada di pesantren. Setiap pelaksanaan evaluasi seluruh staff ekonomi pondok dan yayasan akan memperbaiki jika dalam

pelaksanaannya terdapat kesalahan baik dari unit usahanya sendiri maupun sumber pembiayaan lainnya. Pada dasarnya evaluasi merupakan alat untuk mengukur dan melihat hasil rencana yang dirancang pada *planing*. (Tumanggor et al., 2021).

Dalam hal ini, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pendapatan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia melalui fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk membiayai seluruh aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang berdagang, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadillah 58:12-13.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan RasulNya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan mengenai gambaran tentang konsep pembiayaan pendidikan dalam islam. Ayat 12 memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis, bahkan dalam satu riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan itu jangan terlalu mahal. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis, Riau, dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Menyusun rencana pengembangan kewirausahaan yang terintegrasi dengan kebutuhan dan visi pesantren. Rencana ini harus mencakup jenis usaha, sumber daya yang diperlukan, target pasar, dan proyeksi keuntungan.
2. Penggalangan Modal: Mengumpulkan modal awal untuk memulai usaha kewirausahaan. Modal ini dapat berasal dari yayasan pesantren, sumbangan masyarakat, atau pinjaman modal usaha.
3. Pengembangan Usaha: Memilih jenis usaha kewirausahaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar lokal. Usaha tersebut dapat berupa produksi kerajinan, pertanian, atau jasa lainnya.
4. Pemasaran: Mempromosikan produk atau jasa kewirausahaan kepada masyarakat luas. Pemasaran dapat dilakukan melalui media online, pameran, atau kerjasama dengan toko-toko lokal.
5. Manajemen Keuangan: Menerapkan sistem manajemen keuangan yang baik untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran usaha kewirausahaan. Hal ini meliputi pencatatan transaksi, pengendalian biaya, dan perencanaan keuangan jangka panjang.
6. Pelatihan dan Pembinaan: Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada santri yang terlibat dalam usaha kewirausahaan. Pelatihan ini meliputi keterampilan manajemen, pemasaran, dan keuangan.

7. Evaluasi dan Pengembangan: Melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha kewirausahaan secara berkala. Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Dengan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan, Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, memberikan peluang kerja bagi santri, serta mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai kewirausahaan di kalangan santri.

Kontribusi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis

Manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan telah menghasilkan berbagai output bagi Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis, pondok ini memiliki ciri khas dalam pengelolaan pembiayaan yang mandiri. Pondok pesantren memanfaatkan unit-unit usaha yang telah dimiliki untuk memberikan Kontribusi dalam membantu perekonomian pondok pesantren. Adapun unit usaha yang dimiliki pondok pesantren yaitu ada 13 unit usaha di antara yaitu:

Tabel 1 Unit Usaha Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis

No	Unit Usaha	Hasil Pendapatan Perbulan
1.	Jn Laundry	Rp. 14.000.000
2.	Jn Mart	Rp. 9.000.000
3.	Jn Babershop	Rp. 4.000.000
4.	Jn Almak	Rp. 6.000.000
5.	Jn Goreng	Rp. 10.000.000
6.	Jn Geprek	Rp. 10.000.000
7.	Jn Bakso	Rp. 8.000.000
8.	Jn Grapy	Rp. 25.000.000
9.	Jn Studio	Rp. 3.000.000
10.	Jn House Gess	Rp. 2.000.000
11.	Jn Weading	Rp. 30.000.000
12.	Jn Tata Rias	Rp. 15.000.000
13.	Jn Kabuki	Rp. 4.000.000
Total Perbulan		Rp. 140.000.000
Total Pertahun		Rp. 1.680.000.000

Sumber: Pondok Pesantren Jabal Nur, Kandis

Dari ketiga belas unit usaha tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda setiap bulannya. Adapun hasil dari manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan berupa terpenuhi biaya santri yang kurang mampu, anak yatim, masjid, asrama santri dan kesejahteraan guru. Namun tidak hanya uang SPP santri yang tidak mampu saja dihasilkan, tetapi juga dari unit usaha yang ada di dalam pondok pesantren yang menjadikan program pengembangan kewirausahaan pesantren sebagai media dalam membantu pembiayaan pendidikan pesantren menjadi mandiri.

Hasil dari unit usaha tersebut setiap unit akan dibagi oleh bendahara, setiap unit memiliki seratus persen dari seratus persen tersebut akan dibagi lagi untuk kesejahteraan guru, masjid, anak kurang mampu, anak yatim, dan anak yang berprestasi. Adapun persenan dalam pembagian hasil dari

unit usaha yaitu 20% untuk kesejahteraan guru, 25% untuk operasional pondok pesantren, operasionalnya adalah di berikan ke tata usaha, 5% persen untuk sumbangan masjid, 13% untuk membangun ekonomi baru atau untuk membiayai ekonomi yang lama, 37% untuk yayasan sebagai pemodal. Pembagian 25% yang diberikan ketata usaha, di tata usaha ini memiliki anak yang tidak mampu, anak yatim dan santri subsidi. Pengembangan Kewirausahaan ini modal awal unit usaha ini berasal dari yayasan pondok pesantren.

Dalam pengembangan kewirausahaan ini pesantren memiliki sebuah produk yang dapat digunakan oleh banyak orang terutama santri. Produk yang dibuat dalam unit usaha ini adalah sabun cuci baju, sabun cuci piring, dan madu. Dari hasil produk tersebut santri dapat membeli produk hasil pesantren. Produk ini memang belum dipasarkan ke luar pesantren, namun untuk kedepannya pesantren akan memasarkan produk tersebut ke luar pesantren. Dalam Al- Qur'an juga menjelaskan tentang berdagang, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 1:254.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan berdagang merupakan kegiatan yang sering di lakukan oleh Rasulullah. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan sebagai menyebarkan ajaran islam. Melalui kegiatan berdagang, pesantren dapat memperkenalkan produk-produk yang ada di pondok pesantren ke masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semua elemen yang ada di pondok pesantren ini memiliki tujuan dalam mewujudkan manajemen pembiayaan pendidikan mandiri yang di jembatani oleh pengembangan kewirausahaan pesantren berupa unit-unit usaha yang dimiliki. Hal ini merupakan bentuk hasil dan Kontribusi pesantren untuk mendukung pembiayaan pendidikan mandiri tanpa harus mengandalkan biaya-biaya dari luar atau biaya dari donatur sebagai sumber pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengembangan Kewirausahaan di pondok pesantren berdasarkan aktivitas ekonomi pesantren tersebut, maka ditemukan 4 pola usaha ekonomi di pesantren, yaitu:

1. Usaha ekonomi yang berpusat pada kiai sebagai orang yang bertanggung jawab di pesantren. di mana para kiai mempunyai aset ekonomi seperti kebun atau sawah yang luas, kemudian santri dilibatkan dalam pengelolaan dari menanam, merawat, dan panen. Dari hasil usaha tersebut kiai mendapat keuntungan tenaga dari santri dan para santri juga mendapatkan keuntungan tambahan penghasilan. Hasil usaha ini kemudian digunakan kiai untuk membiayai kebutuhan pengembangan pesantren.
2. Usaha ekonomi untuk memperkuat biaya operasional pesantren. yakni adanya unit-unit ekonomi yang dimiliki pesantren yang hasil usahanya digunakan untuk membiayai pesantren itu sendiri. Unit usaha pesantren menjadi sumber pembiayaan pesantren, sehingga seluruh operasional pesantren atau sebagiannya dapat dipenuhi dari hasil ekonomi tersebut.
3. Usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak dapat dimanfaatkan selepas dari pesantren. usaha ekonomi dalam hal ini berupa sarana pendidikan *life skill* bagi santri (yang terkadang tidak berorientasi profit) agar menjadi bagian sistem pendidikan integral di pesantren.

Usaha ekonomi bagi alumni pesantren merupakan jenis aktivitas ekonomi yang melibatkan alumni pesantren sebagai bagian dari penggalangan dana bagi santri dan pesantren. Meskipun demikian, prioritas utamanya tetap pada pemberdayaan alumni pesantren itu sendiri. Dengan demikian, usaha ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, tetapi juga untuk memberdayakan alumni pesantren dalam bidang ekonomi.

Kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis dapat berdampak positif dalam beberapa hal. Pertama, pengembangan kewirausahaan dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan pesantren, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan. Kedua, melalui kewirausahaan, pesantren dapat menciptakan lapangan kerja bagi santri dan masyarakat sekitar, sehingga ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Ketiga, kewirausahaan juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, dan inovasi kepada santri, yang merupakan nilai tambah dalam pendidikan di pesantren. Dengan demikian, pengembangan kewirausahaan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di pondok pesantren Jabal nur kandis, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis merupakan suatu pengelolaan pembiayaan yang meliputi perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, pengawasan serta pengevaluasian pembiayaan pendidikan. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan langkah awal yaitu untuk mendirikan unit-unit usaha menjadi bagian dari perencanaan pembiayaan pendidikan yang tujuannya untuk pemenuhan pendanaan pondok pesantren. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan merupakan bagaimana melakukan pengalokasian, pengadaan, dan pembelanjaan terhadap pembiayaan yang telah direncanakandan tetap menerapkan prinsip pembiayaan pendidikan. Penagawasan pembiayaan pendidikan ini dilaksanakan agar membentuk suatu pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Bendahara melakukan pengawasan secara langsung dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk memeriksa kesesuaian data terkait pengajuan anggaran maupun pencairannya. Adapun sumber pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Jabal Nur yaitu berasal dari uang SPP, uang tahunan, dan hasil dari unit usaha sebagai biaya tambahannya. Dalam penerapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan di pondok pesantren dapat menjadikan pesantren lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap biaya lainnya.

Manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan telah menghasilkan berbagai output bagi Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis, pondok ini memiliki ciri khas dalam pengelolaan pembiayaan yang mandiri. Pondok pesantren memanfaatkan unit-unit usaha yang telah dimiliki untuk memberikan Kontribusi dalam membatu perekonomian pondok pesantren. Adapun unit usaha yang dimiliki pondok pesantren yaitu ada 13 unit usaha diantara yaitu Jn Laundry, Jn Mart, Jn Babershop, Jn Almak, Jn Goreng, Jn Geprek, Jn Bakso, Jn Grapy, Jn Studio, Jn House Gess, Jn Weading, Jn Tata rias, Jn Kabuki. Semua elemen yang ada di pondok pesantren ini memiliki tujuan dalam mewujudkan manajemen pembiayaan pendidikan mandiri yang di jembatani oleh pengembangan Kewirausahaan pesantren berupa unit-unit usaha yang dimiliki. 4 pola aktivitas pengembangan Kewirausahaan di pondok pesantren yaitu: Usaha ekonomi yang

berpusat pada kiai, usaha ekonomi untuk memperkuat biaya operasional pesantren, usaha ekonomi untuk santri, dan usaha ekonomi bagi alumni pesantren.

BIBLIOGRAPHY

- Adzka, A. (2022). *Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Smp Islam Terpadu Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., Sundulusi, C., Darmawati, D., Harahap, E., & Sijabat, D. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.
- Dinar, M., Ahmad, M., & Hasan, M. (2020). *Kewirausahaan*. Media Sains Indonesia.
- Fattah, N. (2000). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 78(1).
- Irawati, I. (2020). Urgensi pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi di Indonesia. *Instructional Development Journal*, 3(3), 177–187.
- Khambali, K., Mumu, M., Erihadiana, M., & Syah, M. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Kewirausahaan di Pondok Modern Cordoba. *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 341–352.
- Kurniawan Prambudi Utomo, Faroman Syarief, dkk. (2021). *Dasar Manajemen Dan Kewirausahaan* (Widina Bhakti Persada (ed.)).
- Lisnawati, L. (2019). *manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah ibtidaiyah muftadiin islam kendal ngawi*. IAIN Ponorogo.
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43–63.
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25–46.
- Supriyadi, D. (2020). *Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Koperasi Karyawan*.
- Syukur, F. (2011). *Manajemen pendidikan berbasis pada madrasah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Tumanggor, A., Tambunan, J. R., SE, M. M., & SIMATUPANG, P. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit K-Media.
- Undang-Undang Nomor 20. (2023). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Winario, M., & Irawati, I. (2018). Pengaruh kepala sekolah yang berjiwa wirausaha terhadap pengembangan sekolah. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 1(1), 19–28.